

	<b>News Title : Sulit Bentuk Bursa CPO di Indonesia, Ini 3 Alternatif Bappebti</b>	
	<b>Media Name : Liputan6.com</b>	<b>Journalist : Elga Nurmutia</b>
	<b>Publish Date : 01 April 2023</b>	<b>Tonality : Positive</b>
	<b>News Page :</b>	<b>News Value : 2,250,000</b>
	<b>Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti))</b>	<b>Ads Value : 750,000</b>
	<b>Section/Rubrication : Saham</b>	<b>Topic : Bursa CPO</b>

**Sulit Bentuk Bursa CPO di Indonesia, Ini 3 Alternatif Bappebti**



Bappebti menyiapkan tiga alternatif terangan yang harus dibahas untuk mewujudkan bursa CPO

**Liputan6.com, Jakarta** - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memulai langkah menuju bursa CPO (crude palm oil atau minyak sawit mentah) pada Juni 2023 adalah mulai alias banyak terangan yang harus dijawab.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan, terangan esensial terangan yang harus dibahas dalam mewujudkan bursa CPO.

"Ada beberapa permasalahan, (Lini Eropa menantikan anti deforestasi) terangan sampai masuk bursa nanti malah mengganggu ekspor kita, itu yang harus diperbaiki, kami juga mengembangkan beberapa alternatif," kata Didid dalam konferensi pers, Jumat (31/3/2023).

Da bilang, pihaknya tengah menyiapkan tiga alternatif untuk mewujudkan bursa CPO. Salah satunya bursa ini hanya melakukan pencetakan.

"Pernama bursa ini hanya melakukan pencetakan, pasarnya tidak bertemu di situ sehingga nanti akan dibuat harga rata-rata seperti bursa Rotterdam, tapi menurut saya tidak efektif membentuk harga, ini hanya memonitor harga yang sudah terjual saja. Ini bukan yang kami inginkan tapi yang paling mudah," kata dia.

Selanjutnya, ia bilang, alternatif kedua adalah 10 persen dari total ekspor CPO masuk ke bursa. "Katakanlah 10 persen saja yang akan jadi price discovery dan price reference yang akan dijadikan harga acuan, kemudian ke luar negeri dan sebagainya. Secara teoritis tidak semuanya masuk ke bursa," imbuhnya.

Lalu, alternatif ketiga adalah semua CPO bisa masuk ke bursa. "Jadi itu adalah alternatif yang kami kembangkan dan kami sedang bediskus, tidak menutup kemungkinan akan kami gabungkan-gabungkan alternatif yang ada dan menjadi alternatif ke empat," ujarnya.

Meski demikian, Didid optimis CPO bisa segera masuk bursa sesuai target yakni Juni 2023.



2 dari 3 halaman

**Bappebti Targetkan CPO Masuk Bursa Perdagangan Juni 2023**



3 dari 3 halaman

Sebelumnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan bakal segera memulainya minyak kelapa sawit mentah (CPO) dalam bursa perdagangan pada Juni 2023.

Pk Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko optimis pihaknya bisa mendebitkan CPO dalam bursa perdagangan pada Juni 2023 atau paling lambat pada Mei 2023. Dengan mewujudkan CPO ke bursa perdagangan, diharapkan nantinya bisa membangun harga acuan untuk CPO.

Hal ini sejalan dengan langkah Bappebti untuk membentuk Price Reference atau harga acuan untuk berbagai komoditas unggulan Indonesia. Sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Indonesia belum memiliki acuan harga, padahal telah diakui sebagai produsen terbesar di dunia beberapa jenis komoditas tertentu.

"Jadi, pada Juni 2023 komoditas CPO akan masuk dalam bursa perdagangan. Ini yang jadi awal awal harga acuan untuk CPO, yaitu dengan masuknya CPO dalam bursa," kata Didid, pada pertemuan Bazaar Trade Bappebti, di Jalan Marga (22/3/2023).

Membandingkan dengan negara tetangga, Didid menyebut Malaysia butuh lima tahun untuk menetapkan harga acuan komoditas CPO.

"Nantinya setelah CPO masuk bursa perdagangan di Indonesia, maka harga acuan CPO akan terbentuk, di mana penjual akan bertemu dengan pembeli. Selain itu, setelah CPO masuk bursa, nanti Diijen Perdagangan Luar Negeri akan ikut mengawal kebutuhan ekspor," lanjut Didid.

**Harga Acuan untuk Beberapa Komoditas di Indonesia**



3 dari 3 halaman

Selain memulainya CPO dalam bursa perdagangan, Didid bernama pihaknya saat ini tengah membentuk harga acuan untuk beberapa komoditas di Indonesia.

Didid menuturkan, Price Reference atau harga acuan sudah masuk dalam rapat kerja Bappebti dan sudah mendapat berbagai masukan dan berbagai pihak seperti Diijen Perdagangan Luar Negeri dan Badan Negeri, serta Kementerian Perdagangan.

"Saat ini kami sudah hampir selesai roadmap pembentukan Price Reference sekitar 80 hingga 70 persen. Tentunya, dengan adanya masukan dari berbagai pihak akan kami perbaiki," tutur Didid.

Didid berharap, penyusunan peta jalan pembentukan harga acuan ini diharapkan dapat rampung dalam waktu dua minggu ke depan.

"Kami pertama menyusun roadmap yang diharapkan dapat selesai dua minggu, ke depan. Kita bisa selesai bulan depan langsung bisa diimplementasikan, kami harus koordinasi dengan berbagai pihak, lainnya dulu," pungkhas dia.